

SKRIPSI

**ANALISIS BERJALANNYA FUNGSI-FUNGSI PANGKALAN
PENDARATAN IKAN (PPI) PONTAP KECAMATAN WARU
TIMUR, KOTA PALOPO, SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI NENGSI

L051 18 1313



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS BERJALANNYA FUNGSI-FUNGSI PANGKALAN PENDARATAN
IKAN (PPI) PONTAP, KECAMATAN WARU TIMUR, KOTA PALOPO,
SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI NENGSI
L051 18 1313

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin
pada tanggal 20 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Safruddin, S.Pi., M.P., Ph.D
NIP. 197506112003121003

Muhammad Kurnia, S.Pi., M.Sc., Ph.D
NIP. 197206171999031003



Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr. Ir. Alfa Ellep Petrus Nelwan, M.Si.
NIP. 196601151995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Nengsi
NIM : L051 18 1313
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Analisis Berjalannya Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap,
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan



Sri Wahyuni Nengsi

ABSTRAK

Sri Wahyuni Nengsi. L051181313. “Analisis Berjalannya Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan” dibimbing oleh **Safruddin** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Kurnia** sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berjalannya fungsi-fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2021 – Februari 2022 menggunakan metode survei. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara terkait fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan di PPI Pontap, sedangkan data sekunder didapatkan dari pengelola PPI dan instansi terkait. Penilaian berjalannya fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan dilakukan dengan membandingkan kondisi PPI Pontap saat ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPI Pontap memperoleh persentase nilai fungsi pemerintahan sebesar 56%, hal ini menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan termasuk dalam kategori kurang baik, sedangkan fungsi perusahaan memperoleh persentase nilai sebesar 76% yang menjelaskan bahwa fungsi perusahaan termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa tingkat berfungsinya PPI Pontap sudah berjalan dengan baik sebagai pelabuhan perikanan tipe D, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan pada fasilitas yang ada serta pengelolaan pelabuhan yang lebih terarah antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pengelola PPI Pontap.

Kata kunci: PPI Pontap, fungsi pemerintahan, fungsi perusahaan, kendala

ABSTRACT

Sri Wahyuni Nengsi. L051181313. "Analysis the Functions of The Pontap Fish Landing Base (PPI) in East Wara District, Palopo City, South Sulawesi" was guided by **Safruddin** as the Main Advisor and **Muhammad Kurnia** as the Member Advisor.

This study aimed to analyze the functioning of the Pontap Fish Landing Base (PPI) in East Wara District, Palopo City, South Sulawesi. This research was conducted in December 2021 – February 2022 using a survey method. Primary data were obtained through direct field observations and interviews related to governance functions and business functions at PPI Pontap, while secondary data were obtained from PPI managers and related agencies. The assessment of the running of governance functions and business functions is carried out by comparing the current condition of the PPI Pontap with the provisions stipulated by the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number PER.08/MEN/2012 concerning Fisheries Ports. The results showed that PPI Pontap obtained a percentage value of 56% of governance functions, this explained that the functions of governance were included in the poor category, while the business function obtained a percentage value of 76% which explained that the functions were included in the good category. It can be concluded that the level of functioning of the PPI Pontap has been going well as a type D fishing port, although there are still some obstacles in the implementation of governance functions and business functions so it is necessary to improve and develop existing facilities as well as more focused port management between the provincial government, the government region, and the manager of the PPI Pontap.

Keywords: PPI Pontap, governance functions, business functions, constraints

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta inayah-Nya yang karena-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Berjalannya Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak **Abdul Hamid DM** dan Ibu **Suriati, S.Pd** yang selalu mendoakan, menasihati, dan memberi dukungan tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi ini.
2. Saudara saya **Muhammad Dwi Nugroho, ST** dan **Muhammad Rifai Hamid, S.M.**, yang telah membantu dan selalu memberi dukungan agar penulis dapat segera memperoleh gelar sarjananya.
3. Bapak **Safruddin, S.Pi., MP., Ph.D.**, selaku penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing pada penelitian ini bersama dengan Bapak **Muhammad Kurnia, S.Pi., M.Sc., Ph.D.**, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
4. Bapak **Ir. Ilham Jaya, MM** dan Bapak **Prof. Ir. Metusalach, M.Sc.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan pengetahuan, kritik, dan saran yang membangun pada penelitian ini.
5. **Dinas Perikanan Kota Palopo** yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian di PPI Pontap Kota Palopo.
6. Bapak **Ilham Sugianto, S.Kel.**, dan **Staf PPI Pontap Kota Palopo** yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data di lapangan, dan para pelaku kegiatan di PPI Pontap yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data terkait aktivitasnya di PPI Pontap.
7. **Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin** yang bekerja keras dalam menyelesaikan segala administrasi untuk kebutuhan seminar dan ujian skripsi penulis.
8. Sahabat seperjuangan **Titah Fitrah Nurani, Tanti Libelsi, Gustinawati, Andi Ainun Ahrini**, dan **Nurul Febriani** yang telah memberikan semangat, perhatian,

bantuan, dan nasihat dalam proses perkuliahan, penelitian, hingga proses penyelesaian skripsi ini.

9. **Ditha Ariyanti, S.Farm.**, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani suka dan duka yang dilalui penulis.
10. Saudari-saudari KKN Posko 4 **Mutiah Nurul Khatmi, Annisa Nurul Astari B, Maghfirah Sulaiman**, dan **Alifiah Wulandari** yang selalu memberi perhatian dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman **PSP 2018** yang memberi dukungan dan bantuan kepada penulis dari awal kuliah hingga sekarang.
12. Keluarga **KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS** yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa di FIKP UNHAS.
13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi perbaikan kedepannya.

Makassar, 20 Juni 2022

Sri Wahyuni Nengsi

BIODATA PENULIS



Sri Wahyuni Nengsi, lahir di Makassar pada tanggal 24 Mei 2000 yang merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Penulis adalah anak dari pasangan Abdul Hamid DM dan Suriati, S.Pd. Pada tahun 2005 penulis memasuki Taman Kanak-kanak Masyitah Kota Palopo dan lulus pada tahun 2006. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 03 Surutanga Kota Palopo pada tahun 2012, SMP Negeri 3 Palopo pada tahun 2015, dan SMA Negeri 10 Luwu pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis mengikuti tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kepanitiaan kegiatan di HMJ KEMAPI FIKP UNHAS dan KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS. Penulis pernah menjabat sebagai Badan Pengurus Harian Divisi Hubungan Masyarakat KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS Periode 2021.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pelabuhan Perikanan.....	4
B. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	4
C. Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan	5
D. Fasilitas Pelabuhan.....	7
E. Kondisi Berjalannya Fungsi-Fungsi Pelabuhan	8
III. METODE PENELITIAN	9
A. Waktu dan Tempat.....	9
B. Alat dan Bahan.....	9
C. Metode Penelitian	10
D. Analisis Data	10
IV. HASIL	15
A. Keadaan Umum Kota Palopo	15
B. Keadaan Umum PPI Pontap Kota Palopo	15
C. Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	17
D. Kondisi Eksisting PPI Pontap Kota Palopo.....	30
E. Analisis Fungsi-Fungsi PPI Pontap Kota Palopo	30
F. Kendala dalam Melaksanakan Fungsi-Fungsi PPI Pontap	41
V. PEMBAHASAN	44
A. Keadaan Umum PPI Pontap Kota Palopo	44
B. Fungsi-Fungsi PPI Pontap Kota Palopo	44
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

LAMPIRAN	55
----------------	----

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Alat dan Bahan beserta Kegunaannya.	9
2. Kondisi Eksisting Fasilitas PPI Pontap Kota Palopo (KEP.45/MEN/2014)	11
3. Analisis Fungsi Pemerintahan PPI Pontap Kota Palopo	11
4. Analisis Fungsi Pengusahaan PPI Pontap Kota Palopo	13
5. Armada Penangkapan Ikan di PPI Pontap Kota Palopo	17
6. Produksi Hasil Tangkapan tahun 2021 PPI Pontap Kota Palopo	17
7. Fasilitas Pokok PPI Pontap Kota Palopo	18
8. Fasilitas Fungsional PPI Pontap Kota Palopo.....	20
9. Fasilitas Penunjang PPI Pontap Kota Palopo	26
10. Kondisi Eksisting PPI Pontap Kota Palopo	30
11. Analisis Fungsi-Fungsi PPI Pontap (PER.08/MEN/2012)	31
12. Analisis Pelaksanaan Fungsi-Fungsi PPI Pontap	32
13. Analisis Fungsi Pemerintahan PPI Pontap	38
14. Analisis Fungsi Pengusahaan PPI Pontap.....	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta Lokasi Penelitian	9
2. PPI Pontap Kota Palopo (UPTD PPI Pontap Kota Palopo, 2022)	16
3. Layout PPI Pontap Kota Palopo (UPTD PPI Pontap K ota Palopo, 2022)	16
4. Dermaga	19
5. Kolam Pelabuhan	19
6. Jalan Komplek.....	20
7. Tempat Pelelangan Ikan.....	21
8. Pabrik Es.....	22
9. <i>Coldstorage</i>	22
10. SPDN	23
11. Tangki Air Bersih	24
12. <i>Docking</i>	24
13. Gedung Pengolahan	25
14. Kantor Pengelola PPI	26
15. Balai Pertemuan Nelayan	27
16. Pos Masuk	27
17. Pos Jaga	28
18. Mushallah.....	28
19. Kios.....	29
20. Mandi Cuci Kakus (MCK)	29

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Fasilitas-Fasilitas PPI Pontap Kota Palopo.....	56
2. KEP.45/MEN-KP/2014	57
3. PER.08//MEN/2012	59
4. Dokumentasi Penelitian.....	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, Kota Palopo terletak antara 2°53'15" – 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" – 10°14'34" Bujur Timur. Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 24,52 km². Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Perairan laut dan pesisir Kota Palopo terletak di ujung utara kawasan Teluk Bone dan sebelah barat dari perairan laut Provinsi Sulawesi Tenggara. Perairan laut Kota Palopo mencakup lima kecamatan yang berpantai yaitu: Wara Selatan, Wara Timur, Wara Utara, Bara, dan Telluwanua. Luas wilayah perairan laut Kota Palopo ± 147 km² dengan panjang garis pantai sekitar 21 km.

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak di daerah pesisir yang memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah. Kota Palopo sebagai kota PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 2017 mendapat kriteria sebagai "Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berpotensi atau mendukung ekonomi kelautan nasional" (Susantri *et.al*, 2019).

Pembangunan pelabuhan perikanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan infrastruktur perikanan. Pelabuhan perikanan tidak hanya menyediakan fasilitas pendaratan, pengolahan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada nelayan yang menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan fungsinya (Atharis, 2008).

Secara umum, fungsi Pelabuhan Perikanan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 41A ayat (1) tentang Perikanan yang berbunyi "Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran".

Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai tumpuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan nelayan serta pengelolaannya. Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, diperlukan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai. Menurut Lubis (2012), secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia sangat kompleks, mulai dari terbatasnya fasilitas yang ada, lemahnya pengelolaan, hingga kurang kompetennya sumberdaya manusia pengelola pelabuhan. Hal ini ternyata berimbas pada pendapatan pengguna jasa pelabuhan perikanan, terutama nelayan, selaku pelaku utama usaha

perikanan tangkap. Keterbatasan kapasitas fasilitas akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas kepelabuhanan sehingga fungsinya tidak tercapai secara optimal. Hal tersebut akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan perikanan tangkapnya. Oleh karena itu revitalisasi Pelabuhan Perikanan, khususnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), merupakan langkah yang harus segera dilakukan pemerintah. Menurut Lubis (2012), PPI dapat direvitalisasi dengan membangun fasilitas baru, meningkatkan kapasitas fasilitas yang ada, meningkatkan produktivitas fasilitas, dan meningkatkan kualitas layanan, sumber daya manusia, dan manajemen pengelolaan. Menurut Lubis (2006), pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan yang terarah akan menunjukkan keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Beberapa penelitian terkait fungsi-fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Indonesia yaitu, Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam Usaha Perikanan (Sistian *et al.*, 2016), Tingkat Pelaksanaan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (Dianita, C, 2017), Analisis Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi-Selatan (Susi Suharsi, 2020).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap merupakan satu-satunya pelabuhan Tipe D yang beroperasi di Kota Palopo. Melihat fungsi PPI sebagai faktor pendorong keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan, maka dirasa perlu untuk diadakan penelitian mengenai “Analisis Berjalannya Fungsi-Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kota Palopo” agar fungsi-fungsi pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah fungsi-fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kota Palopo, meliputi fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan sudah berjalan dengan baik?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kota Palopo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk menganalisis jalannya fungsi-fungsi pelabuhan perikanan di PPI Pontap Kota Palopo, berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan di PPI Pontap Kota Palopo.

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan pelabuhan perikanan kedepannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan

Definisi pelabuhan perikanan menurut Undang–Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas–batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebaga tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan fungsi dan fasilitasnya pelabuhan perikanan dibagi menjadi empat kelas atau tipe, yakni (a) Tipe A atau Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS), (b) Tipe B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), (c) Tipe C atau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPC), dan (d) Tipe D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

B. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Syafei (2005) menjelaskan definisi dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu pelabuhan khusus yang menjadi pusat pengembangan kegiatan ekonomi perikanan, mulai dari kegiatan produksinya sampai dengan kegiatan pemasaran, sehingga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah klasifikasi dari pelabuhan perikanan tipe D, yang ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional (KEP.45/MEN-KP/2014). Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (2004), definisi dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan lingkungan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi perikanan yang meliputi wilayah perairan dan daratan, berdasarkan fungsinya digunakan untuk memberi pelayanan bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang memiliki kapal–kapal ukuran kecil dengan jangkauan penangkapan disekitar pantai.

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (2006), bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai pelabuhan perikanan tipe D memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 meter dengan kedalaman kolam minus 2 meter; dan
- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan.

C. Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 41, fungsi dan peranan pelabuhan perikanan adalah mendukung kegiatan perikanan yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran serta pendistribusian hasil tangkapan nelayan.

Menurut Lubis (2000), fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan pendekatan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi maritim (tempat kontak nelayan dengan pemilik kapal);
2. Fungsi komersial (tempat untuk mempersiapkan pendistribusian hasil perikanan melalui transaksi pelelangan ikan);
3. Fungsi jasa (jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, dan jasa penanganan mutu ikan).

Keberhasilan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan didasarkan pada terlaksana atau tidaknya fungsi pelabuhan perikanan secara optimal. Sesuai dengan PER.08/MEN/2012 fungsi pelabuhan perikanan terdiri atas dua, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kedua fungsi pelabuhan perikanan tersebut.

1. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam PER.08/MEN/2012 tentang kepelabuhanan perikanan, fungsi pemerintahan adalah fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;

- d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. Pelaksanaan kesyahbandaran;
- g. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- j. Pemantauan wilayah pesisir;
- k. Pengendalian lingkungan;
- l. kepabeanan; dan/atau
- m. Keimigrasian.

2. Fungsi Pengusahaan

Berdasarkan PER.08/MEN/2012 fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. Pelayanan bongkar muat ikan;
- c. Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- d. Pemasaran dan distribusi ikan;
- e. Pemanfaatan lahan dan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- f. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- g. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- h. Wisata bahari; dan/atau
- i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsinya, maka pelabuhan perikanan memegang peranan penting sebagai berikut (Syafei, 2005):

- 1. Tempat penampungan produksi dan pusat penjualan;
- 2. Proses mekanisme pengaturan harga agar tidak merugikan nelayan serta memperlancar pemasaran;
- 3. Langkah untuk mengetahui kemampuan pedagang dan aktifitas pemasaran;
- 4. Pusat penyediaan bahan makanan sumber protein hewani secara kontinyu bagi masyarakat;
- 5. Pusat kehidupan masyarakat nelayan;
- 6. Pusat aktifitas industri perikanan;

7. Langkah untuk menstabilkan kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional.

D. Fasilitas Pelabuhan

Salah satu fungsi dari pelabuhan ialah dapat melindungi kapal yang sedang berlabuh dan beraktivitas di lokasi pelabuhan. Untuk dapat mencapai fungsinya maka pelabuhan perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas utama yang terdapat di suatu pelabuhan perikanan sebagai penunjang kegiatan operasional pelabuhan (Sistian *et al.*, 2016). Fasilitas pokok terdiri dari:

- a. Dermaga Pelabuhan;
- b. Alur Pelayaran;
- c. *Breakwater* (penahan gelombang) dan *Revertment* (turap);
- d. Kolam Pelabuhan
- e. Jalan Kompleks;
- f. Drainase; dan
- g. Lahan

b) Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna fasilitas dasar. Fasilitas fungsional terdiri dari:

- a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI): pasar ikan dan tempat pengemasan ikan;
- b. Navigasi: telepon, internet, radio komunikasi, dan lampu suar;
- c. Instalasi Perbekalan: instalasi suplai air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), instalasi pabrik es, dan instalasi listrik;
- d. Tempat Penyimpanan: *coldstorage*
- e. Tempat Pemeliharaan Kapal dan Alat Penangkapan Ikan: bengkel, *dock/slipaway*, dan tempat perbaikan jaring;
- f. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan: laboratorium pembinaan mutu;
- g. Perkantoran: pos pelayanan terpadu dan kantor administrasi pelabuhan; dan
- h. Fasilitas K5: alat pemadam kebakaran, *hydrant*, *amphibious*, mobil pembersih lantai, *dumpruck*, dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

c) Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang terdiri dari:

- a. Balai Pertemuan Nelayan;
- b. *Mess Operator*;
- c. Wisma Nelayan;
- d. Fasilitas Sosial dan Umum: tempat ibadah dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- e. Pertokoan;
- f. Pos Jaga;
- g. Sarana Informasi Pelabuhan, yaitu *videotron* dan *runningtext*.

E. Kondisi Berjalannya Fungsi-Fungsi Pelabuhan

Berdasarkan hasil penelitian Susi Suharsi tahun 2020 melalui pengamatan langsung dan wawancara di PPI Cempae Pare-Pare dengan menganalisis 19 fungsi-fungsi pelabuhan berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan diperoleh hasil bahwa terdapat 7 fungsi yang tidak dilaksanakan yaitu pelayanan pembinaan mutu / pengolahan hasil perikanan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, pelaksanaan karantina ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, publikasi layanan sandar dan labuh kapal ikan / kapal pengawas, pemantauan wilayah pesisir, pelayanan pengolahan ikan, serta terdapat 2 fungsi yang tidak tersedia di PPI Cempae Pare-Pare yakni wisata bahari dan layanan jasa lainnya. Sedangkan fungsi yang berjalan ada 10 yaitu pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pengendalian lingkungan, pelayanan tambat dan labuh kapal, pelayanan bongkar muat ikan, pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan lahan dan fasilitas, perbaikan / pemeliharaan kapal, layanan logistik dan perbekalan kapal.